

Judul : Azis Dilaporkan ke MKD
Tanggal : Selasa, 27 April 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Azis Dilaporkan ke MKD

Azis Syamsuddin belum merespons terkait dugaan keterlibatannya di kasus Syahril.

■ NAWIR ARSYAD AKBAR
RIZKYAN ADIYUDHA

JAKARTA — Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) resmi melaporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Laporan tersebut terkait dugaan keterlibatan Azis dalam perkara suap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKP Stepanus Robin Pattuju, dan Wali Kota Tanjung Balai M Syahril.

Azis Syamsuddin merupakan politisi kawakan Partai Golkar. Dia dilantik sebagai Wakil Ketua DPR pada 2019 dari Fraksi Golkar. Pada periode sebelumnya, dia adalah Ketua Komisi III DPR dari fraksi yang sama.

Azis Syamsuddin belum memberikan keterangan apapun terkait kasus tersebut, termasuk terkait laporan LP3HI. Konfirmasi yang dilakukan *Republika* melalui sambungan telepon dan pesan singkat tidak direspons. Ia tercatat terakhir memberikan pernyataan tertulis kepada awak media pada Jumat (23/4), tetapi bukan terkait kasusnya.

"Kan di KPK itu ada peraturan internal di mana penyidik dan pegawai itu tidak boleh ketemu dengan pihak yang akan diperiksa atau pihak yang terlibat," ujar Wakil Ketua LP3HI, Kurniawan Adi Nugroho saat dihubungi, Senin (26/4).

Menurut dia, Azis telah keliru dalam menggunakan wewenangnya sebagai wakil ketua DPR. Apalagi, politikus Partai Golkar itu diketahui juga sebelumnya anggota Komisi III yang bermitra dengan KPK.

"Ini sudah melanggar, kalau menurut kami sudah bertentangan dengan kewajiban, melanggar kode etik. Maka kemudian kita laporkan beliau ke MKD," ujar Kurniawan.

Ia berharap MKD DPR dapat segera memanggil Azis untuk diperiksa. Pasalnya, masyarakat saat ini tengah menyorot Azis dan KPK dalam kasus tersebut. "Bagaimana seorang pejabat lembaga tinggi kemudian dia masuk intervensi dalam proses-proses penegakan hukum," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua MKD, Habiburokhman pada Ahad (25/4), mengaku belum akan memanggil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dengan alasan masih menunggu proses yang masih berjalan di KPK. "Dalam menjalankan fungsi penegakan kehormatan dan keluhuran martabat DPR, kami harus memiliki bukti yang meyakinkan," kata dia.

KPK pada Kamis (22/4), menetapkan tersangka terhadap Stepanus, pengacara Maskur Husain, dan Syahril terkait suap penghentian penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai. Robin dan Maskur diduga menerima suap dari Syahril

yang terjatuh kasus tersebut sebesar Rp 1,3 miliar dari komitmen *fee* Rp 1,5 miliar.

KPK menduga Azis Syamsuddin yang memperkenalkan Stepanus dengan Syahril di rumah dinas di Jakarta Selatan pada Oktober 2020. Dalam pertemuan tersebut, Azis meminta Stepanus membantu penghentian penyelidikan kasus Syahril yang tengah dilakukan KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri pada Sabtu (24/4), mengatakan, pemeriksaan Azis akan dilakukan pada Selasa hari ini. Namun, hingga kemarin, Plt Juru Bicara KPK belum bisa memastikan jadwal pemeriksaan Azis. Ia hanya mengatakan, Azis akan segera diperiksa. "Pemeriksaan saksi-saksi akan segera dilakukan," kata Ali, Senin (26/4).

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta KPK juga segera menyita rekaman kamera pengawas (CCTV) di rumah dinas Azis Syamsuddin. Permintaan itu dilayangkan dengan surat resmi yang dikirim ke pimpinan dan Dewas KPK. "Kami tidak berharap penyitaan ini lamban dilakukan atau bahkan tidak dilakukan sehingga barang bukti pertemuan menjadi hilang. Kami tidak berharap kegagalan penggeledahan perkara sembako bansos Kemensos terulang dalam perkara ini," ujar dia.

Komisioner disebut

Boyamin juga mengaku mendengar informasi Syahril sempat berusaha menjalin komunikasi dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli



MKD harus memiliki bukti yang meyakinkan.

Siregar. "Tetapi apakah Bu Lili menanggapi atau menindaklanjuti seperti apa, saya belum ada informasi, tetapi setidaknya Wali Kota punya nomornya Bu Lili," ujar Boyamin.

Semestinya, kata dia, Lili dapat bersikap tegas dengan memblokir nomor telepon Syahril karena berurusan dengan tanggung jawabnya sebagai pimpinan KPK. Boyamin pun meminta Dewas KPK menyelidikinya. "Harusnya Dewan Pengawas mulai melakukan penyelidikan dan proses-proses sidang dewan etik mulai sekarang, melakukan investigasi dan klarifikasi tanpa harus menunggu proses pidananya, karena ini harus saling menunjang," kata dia.

Saat jumpa pers pengumuman tersangka pada Kamis (22/4), Ketua KPK Firli Bahuri sempat merespons saat dikonfirmasi soal dugaan komunikasi Syahril dan Lili. "Saya tidak tahu apakah betul ada komunikasi. Kalaupun ada, apa bentuk komunikasinya, apakah komunikasinya dalam rangka pelaksanaan tugas atau komunikasi bentuk lain. Jadi, tolong kami dibantu dan ini akan kami dalam," ujar Firli.

■ antara ed: ilham tirta